

## PARTISIPASI POLITIK SEBAGAI SENJATA: KAMPANYE HITAM DAN KRISIS INTEGRITAS

Gistiana Rahmadhita Tanzill<sup>1</sup>, Hadi Fadhilah Yusup<sup>2</sup>, Mochamad Yuzar Rauf<sup>3</sup>  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung  
Email: [gistianarahmadhita@gmail.com](mailto:gistianarahmadhita@gmail.com), [hadifadhil177@gmail.com](mailto:hadifadhil177@gmail.com), [raufyuzar@gmail.com](mailto:raufyuzar@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Political participation is one of the main components in a democratic system which provides opportunities for citizens to play an active role in determining public policy and electing leaders. Political campaigns have now transformed by using social media as a means to gain support from the public. However, with advances in technology, the negative side of political participation has also emerged, which often results in black campaign practices. The aim of this research is to solve the problems that occur. The research method used is a qualitative-inductive approach with literature study as a data collection tool. This participation is often misused in the form of smear campaigns, which can weaken democracy. The negative impact of black campaigns by spreading false information can influence people's political behavior and damage political education, damage the reputation or character of political opponents and crisis political integrity. Restoring the integrity of democracy due to black campaigns, by increasing public political literacy, monitoring and enforcing the law, transparency and accountability and the media must also be regulated to reduce the spread of information.*

**Keywords:** *Political participation, Black campaign, Integrity crisis.*

**ABSTRAK**

Partisipasi politik adalah salah satu komponen utama dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berperan aktif dalam menentukan kebijakan publik dan memilih pemimpin. Kampanye politik kini telah bertransformasi dengan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Namun, dengan kemajuan teknologi, muncul pula sisi negatif dari partisipasi politik, yang sering kali berujung pada praktik kampanye hitam. Tujuan penelitian ini untuk memecahkan permasalahan yang terjadi tersebut. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif-induktif dengan studi literatur sebagai alat pengumpulan data. Partisipasi ini sering disalahgunakan dalam bentuk kampanye hitam, yang dapat melemahkan demokrasi. Dampak negatif dari kampanye hitam dengan menyebarkan informasi palsu dapat memengaruhi perilaku politik masyarakat dan merusak pendidikan politik, merusak reputasi atau karakter lawan politik dan krisis integritas politik. Mengembalikan integritas demokrasi karena kampanye hitam, dengan peningkatan literasi politik masyarakat, pengawasan dan menegakkan hukum, transparansi dan akuntabilitas dan media juga harus diatur untuk mengurangi penyebaran informasi.

**Kata kunci:** *Partisipasi politik, Kampanye hitam, Krisis integritas.*

**Article History**

Received: Desember 2024  
Reviewed: Desember 2024  
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<sup>1</sup> 1223030047

<sup>2</sup> 1223030049

<sup>3</sup> 1223030064

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Partisipasi politik, menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson yang dikutip oleh Miriam Budiardjo, merujuk pada keterlibatan warga negara dalam memengaruhi keputusan yang diambil oleh pemerintah. Bentuk partisipasi ini dapat bersifat individu atau kelompok, terorganisasi atau spontan, kolektif atau sporadis, damai atau penuh kekerasan, legal atau ilegal, serta efektif maupun tidak efektif. Dalam penelitian klasik mereka yang berjudul *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Huntington dan Nelson menekankan bahwa bentuk partisipasi yang bersifat dipaksakan juga merupakan bagian dari kajian partisipasi politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Bolgherini, yang menyatakan bahwa paksaan adalah salah satu cara dalam berpartisipasi politik. Menurut Huntington dan Nelson, perbedaan utama antara partisipasi politik sukarela dan yang dimobilisasi lebih terletak pada prinsip dibandingkan dengan realitas tindakannya. Dengan kata lain, baik secara sukarela maupun terpaksa, warga negara tetap dianggap terlibat dalam aktivitas partisipasi politik.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, partisipasi berperan penting dalam demokrasi, karena memastikan bahwa kekuasaan selalu berfokus pada kepentingan publik. Demokrasi tidak bisa terwujud tanpa adanya partisipasi politik dari warga, karena partisipasi merupakan inti dari sistem demokrasi. Jika sebuah negara membatasi hak akses dan keterlibatan warganya dalam penentuan hasil keputusan, maka negara tersebut belum dapat dianggap memiliki demokrasi yang berkembang dengan baik. Kebebasan rakyat untuk berpartisipasi dalam politik menjadi indikator dasar dalam menilai sejauh mana demokrasi berjalan di negara tersebut. Sebagai sistem politik, demokrasi bertujuan untuk menyediakan ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam proses pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan zaman, partisipasi politik tidak lagi sebatas pada cara-cara yang konvensional. Dalam era digital, kampanye politik telah mengalami transformasi besar dengan memanfaatkan berbagai media sosial sebagai alat untuk meraih dukungan masyarakat. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, muncul pula sisi gelap dari partisipasi politik yang sering kali mengarah pada praktik kampanye hitam. Kampanye hitam menurut Devi Darmawan merupakan model kampanye yang melempar isu, gosip dan bentuk lainnya yang tidak didukung fakta atau bukti sehingga dapat menyesatkan atau merusak citra lawan politik. Kampanye hitam telah menjadi senjata yang semakin diasah tajam oleh aktor-aktor politik dalam pertarungan politik. Praktik kampanye hitam dapat mencederai etika politik dan juga kualitas demokrasi itu sendiri. Melalui media sosial, pesan-pesan negatif dan fitnah dapat tersebar dengan sangat cepat dan luas, menciptakan distorsi informasi yang sulit untuk diluruskan.

Kompleksitas kampanye hitam semakin canggih dengan dukungan teknologi informasi dan media sosial. Narasi palsu dapat dengan cepat menyebar, mengaburkan batas antara kebenaran dan kebohongan, serta membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Krisis integritas yang ditimbulkan oleh praktik kampanye hitam tidak hanya berdampak pada tingkat elektoral, melainkan jauh menembus struktur sosial dan psikologis masyarakat. Kampanye hitam dapat menciptakan polarisasi yang tajam, memecah-belah komunitas dan menghancurkan dialog konstruktif yang seharusnya menjadi ciri demokrasi yang sehat.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi politik yang bertransformasi menjadi alat dalam kampanye hitam?
2. Bagaimana dampak kampanye hitam yang berpengaruh terhadap integritas demokrasi?
3. Bagaimana strategi dalam mengembalikan integritas demokrasi di tengah maraknya kampanye hitam?

## TINJAUAN LITERATUR

---

<sup>4</sup> Aziz Y. M dan Hidayat S. (2020). *Dinamika Sistem Politik*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hal. 47.

Partisipasi politik adalah salah satu elemen esensial dalam demokrasi, yang memungkinkan warga negara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan publik. Teori partisipasi politik seperti yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo, menekankan bahwa partisipasi politik dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, melalui berbagai cara seperti pemilu, protes dan kampanye.<sup>5</sup> Dalam bentuk idealnya, partisipasi politik bertujuan untuk memperkuat legitimasi demokrasi dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara. Namun, dalam praktiknya, partisipasi ini sering kali mengalami distorsi, terutama melalui fenomena kampanye hitam yang bertujuan untuk merusak reputasi lawan politik dengan cara menyebarkan informasi palsu.<sup>6</sup> Kampanye hitam tidak hanya mencederai proses politik yang sehat, tetapi juga mengindikasikan krisis integritas dalam praktik politik di Indonesia.

Dari sudut pandang teori etika politik, partisipasi politik semestinya tidak hanya dinilai berdasarkan efektivitasnya, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip moral dan keadilan. Menurut Deliar Noer, etika politik adalah pedoman normatif yang menuntut setiap aktor politik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan dan tanggung jawab sosial.<sup>7</sup> Dalam konteks kampanye hitam, tindakan menyebarkan informasi palsu bertentangan dengan prinsip kejujuran, sementara dampak polarisasi yang dihasilkannya melanggar tanggung jawab untuk menjaga harmoni sosial. Akibatnya, kampanye hitam tidak hanya merusak integritas individu yang menjadi target, tetapi juga memperburuk krisis kepercayaan terhadap institusi politik.

Penggabungan teori partisipasi politik dan teori etika politik memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap kampanye hitam sebagai fenomena politik yang kompleks. Teori partisipasi politik menjelaskan bagaimana fenomena ini muncul dan berfungsi dalam praktik demokrasi, sedangkan teori etika politik memberikan kerangka untuk mengevaluasi dampaknya terhadap moralitas dan keadilan. Fenomena kampanye hitam di Indonesia menunjukkan adanya celah dalam regulasi dan pengawasan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan partisipasi politik untuk tujuan destruktif.<sup>8</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif antara masyarakat, pemerintah dan media untuk memperkuat literasi politik dan etika, sekaligus memastikan bahwa mekanisme demokrasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai moral yang luhur. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dengan menggabungkan dua teori, yakni teori partisipasi politik dan teori etika politik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada transformasi partisipasi politik yang menjadi alat kampanye hitam, dampak yang terjadi tersebut terhadap integritas demokrasi dan mengembalikan integritas demokrasi dalam maraknya kampanye hitam yang terjadi, sedangkan dalam beberapa penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada perbandingan antara dampak positif dan dampak negatif dari kampanye hitam. Kemudian penelitian ini juga dibuat dengan menggunakan analisis teori partisipasi politik dan etika politik terhadap partisipasi politik negatif berupa kampanye hitam.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sugiono (2013:2) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana praktik kampanye hitam dan dampaknya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi literatur. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, menganalisisnya secara mendalam dan membangun pemahaman yang komprehensif mengenai topik penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan studi literatur. Dimana data yang digunakan berasal dari buku, jurnal, serta literatur terkait lainnya yang mendukung topik yang dibahas.

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 122.

<sup>6</sup> Ramlan Surbakti. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. Hal. 79.

<sup>7</sup> Deliar Noer. (1987). *Pemikiran Dan Perubahan Politik Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. Hal. 213.

<sup>8</sup> Mochtar Mas'ued. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 56.

Studi literatur adalah metode yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh pengetahuan yang komprehensif mengenai suatu topik tertentu melalui kajian kritis terhadap berbagai literatur terkait. Sebab pemilihan pendekatan ini karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi yang mendalam terhadap isu penelitian melalui kajian pustaka, tanpa memerlukan pengumpulan data primer di lapangan.

Alat utama yang dipergunakan pada penelitian ini ialah berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, dimana jurnal yang relevan dengan topik penelitian, baik yang berasal dari database nasional maupun internasional, buku referensi, buku penelitian yang membahas tentang media sosial, politik dan partisipasi politik ataupun buku teks. Kemudian artikel berita dari media online dan cetak yang membahas tentang penggunaan media sosial dalam konteks politik. Serta laporan penelitian dari lembaga survei atau lembaga penelitian yang relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif untuk mengembangkan teori baru berdasarkan data yang dikumpulkan. Analisis data dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai penelitian sebelumnya untuk mencari pola umum. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, artinya peneliti membangun teori atau konsep dari data yang diperoleh. Mensintesis temuan dari berbagai studi untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai topik penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang relevan dengan partisipasi politik dan kampanye hitam. Metode yang digunakan adalah studi literatur, yang meliputi pencarian, penelaahan dan analisis kritis terhadap jurnal-jurnal ilmiah yang relevan.

## PEMBAHASAN

### A. Partisipasi Politik Bertransformasi Menjadi Alat Dalam Kampanye Hitam

Partisipasi politik merupakan salah satu fondasi penting dalam sistem demokrasi, yang mencakup berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses politik, seperti pemilu, demonstrasi, kegiatan partai politik dan kampanye. Namun, dalam praktiknya, partisipasi politik tidak selalu digunakan secara positif. Salah satu bentuk penyalahgunaan partisipasi politik adalah transformasinya menjadi alat kampanye hitam, yakni penyebaran informasi yang bersifat negatif, menyesatkan atau fitnah untuk merusak reputasi lawan politik. Fenomena ini menjadi semakin mengkhawatirkan, terutama dalam era digital yang memungkinkan informasi menyebar secara masif dalam waktu singkat. Kampanye hitam sering kali didorong oleh kepentingan tertentu untuk memenangkan pertarungan politik.

Menurut Huntington, partisipasi politik dalam bentuk negatif seperti kampanye hitam sering kali terjadi di negara-negara dengan demokrasi yang belum matang. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak selalu memperkuat demokrasi, melainkan dapat menjadi alat untuk melemahkan proses demokrasi itu sendiri. Dalam konteks ini, kampanye hitam berfungsi sebagai senjata untuk memanipulasi opini publik dan mengontrol persepsi terhadap kandidat atau partai tertentu. Di Indonesia, misalnya, kampanye hitam sering muncul menjelang pemilu, terutama melalui media sosial, di mana penyebaran hoax dan fitnah menjadi alat utama untuk menjatuhkan lawan politik.<sup>9</sup>

Transformasi partisipasi politik menjadi alat kampanye hitam juga didorong oleh kemajuan teknologi informasi. Platform digital menjadi medan tempur baru dalam perang politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Shirky, teknologi digital dapat memobilisasi partisipasi politik, tetapi juga mempermudah penyebaran informasi palsu. Akibatnya, masyarakat sering kali kesulitan membedakan antara informasi yang valid dan yang hanya bertujuan untuk mendiskreditkan pihak tertentu.<sup>10</sup> Di sisi lain, transformasi partisipasi politik menjadi alat kampanye hitam juga mencerminkan lemahnya literasi politik masyarakat. Rendahnya tingkat literasi politik membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh narasi negatif yang disebarluaskan melalui kampanye hitam. Dalam situasi ini, partisipasi politik tidak lagi

---

<sup>9</sup> Suryadi. (2018). "Politisasi Identitas Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi Di Indonesia" *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 10(2). Hal. 145.

<sup>10</sup> Shirky. (2008). *Here Comes Everybody: The Power Of Organizing Without Organizations*. Penguin Press: New York.

menjadi ekspresi kesadaran demokrasi, tetapi justru menjadi sarana untuk memperkuat polarisasi politik.

Namun, terdapat juga pendapat yang mendukung dengan adanya kampanye hitam, karena memiliki kesimpulan yang serupa, pesan negatif dalam kampanye dapat memobilisasi pemilih, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Secara politik, mereka yang mendukung pandangan ini percaya bahwa pesan negatif yang ditujukan kepada lawan politik juga dapat berperan penting dalam mendapatkan dukungan pemilih. Frekuensi orang yang menerima pesan negatif berbanding lurus dengan tingkat partisipasi pada hari pemilihan. Namun, pesan positif dalam kampanye tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi pemilih dibandingkan dengan pesan negatif yang memiliki dampak mobilisasi yang lebih besar.<sup>11</sup>

#### **B. Dampak Kampanye Hitam Dalam Partisipasi Politik Terhadap Integritas Demokrasi**

Kampanye hitam memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi politik dan integritas demokrasi. Secara umum, kampanye hitam, yang dilakukan dengan menyebarkan informasi palsu, manipulatif atau fitnah terhadap kandidat atau kelompok politik tertentu, dapat memengaruhi perilaku politik masyarakat. Dalam konteks partisipasi politik, fenomena ini sering kali memanipulasi persepsi publik untuk mendukung atau menolak pihak tertentu berdasarkan informasi yang tidak akurat.<sup>12</sup> Akibatnya, partisipasi politik yang seharusnya berfungsi sebagai ekspresi kesadaran politik berubah menjadi tindakan yang didasarkan pada emosi negatif, seperti kebencian atau ketakutan, bukan pada pertimbangan rasional dan objektif.

Kampanye hitam memiliki dampak negatif terhadap pendidikan politik masyarakat, karena cenderung menggambarkan bahwa segala cara, termasuk yang tidak etis, dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kampanye hitam sering dimanfaatkan sebagai alat untuk menjatuhkan reputasi atau melakukan pembunuhan karakter terhadap lawan politik.<sup>13</sup> Hal ini berpotensi memicu konflik antara pasangan calon, tim sukses, maupun pendukungnya. Sebagai contoh, pada Pemilu Presiden 2019, calon wakil presiden dari pasangan nomor urut 2 Sandiaga Uno, menjadi target kampanye hitam melalui penyebaran informasi palsu di media sosial dengan nama "Skandal Sandiaga". Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi upaya mewujudkan pemilu yang damai dan bersih, karena kampanye hitam dapat meningkatkan potensi konflik antara pendukung kedua kubu.

Ada dua faktor utama yang memicu terjadinya kampanye hitam. Pertama, kampanye hitam dapat dilakukan oleh tim kandidat yang memiliki popularitas lebih rendah dibandingkan lawannya. Kedua, strategi ini dapat dilakukan oleh tim kandidat itu sendiri dengan mengklaim telah difitnah atau dianiaya, sehingga menarik perhatian publik untuk mendapatkan simpati. Fenomena semacam ini mencerminkan tantangan besar dalam menjaga integritas proses politik.

Dampak signifikan dari kampanye hitam terhadap demokrasi adalah munculnya krisis integritas politik. Ketika kampanye hitam menjadi bagian umum dalam persaingan politik, kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan aktor politik semakin menurun.<sup>14</sup> Situasi ini diperburuk oleh meningkatnya polarisasi sosial akibat penyebaran narasi negatif yang memecah belah masyarakat. Dalam jangka panjang, kampanye hitam dapat mengurangi legitimasi institusi demokrasi, karena masyarakat mulai menganggap bahwa proses politik tidak lagi berlandaskan nilai kejujuran dan keadilan.<sup>15</sup> Era digital memperburuk keadaan ini, di mana media sosial menjadi sarana utama untuk menyebarkan kampanye hitam,

<sup>11</sup> Muhammad Rizaldi. (2014). "Pro Dan Kontra Dalam Black Campaign Di Indonesia" *Jurnal Fiat Justitia*, 2(2). Hal. 11-13.

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 138.

<sup>13</sup> Nurul Akhmad. (2010). *Mengenal Dan Mengawal Demokrasi: Kajian Teoritik Dan Kumpulan Artikel Pemilu*. Semarang: CV Aneka Ilmu.

<sup>14</sup> Ramlan Surbakti. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. Hal. 79.

<sup>15</sup> Deliar Noer. (1987). *Pemikiran Dan Perubahan Politik Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. Hal. 216.

mempercepat distribusi informasi palsu secara luas.<sup>16</sup> Akibatnya, masyarakat semakin mudah dimanipulasi secara politik, terutama di tengah rendahnya literasi digital. Dalam kondisi ini, partisipasi politik masyarakat sering kali diarahkan untuk mendukung agenda tertentu tanpa pemahaman yang memadai mengenai kebijakan atau visi kandidat sebenarnya.

Kampanye hitam mencerminkan realitas politik Indonesia saat ini, di mana praktik semacam ini memberikan dampak negatif terhadap pendidikan politik masyarakat. Demokrasi Indonesia sulit berkembang dengan baik jika pendidikan politik yang diterima masyarakat diwarnai oleh tindakan-tindakan yang tidak etis. Padahal, pendidikan politik merupakan elemen penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negeri ini.<sup>17</sup> Dampak kampanye hitam tidak hanya dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga merusak dasar-dasar demokrasi itu sendiri. Demokrasi membutuhkan partisipasi politik yang sehat, yang didasarkan pada diskusi rasional dan transparansi, untuk menjaga legitimasi serta integritasnya.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Topo Santoso, menjelaskan perbedaan antara kampanye negatif dan kampanye hitam. Dalam konteks hukum pemilu, kampanye negatif diperbolehkan, sementara kampanye hitam dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Ia menegaskan bahwa pelaku kampanye hitam dapat dijerat dengan hukuman sesuai ketentuan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan Pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Pasal 280 ayat (1) huruf c mengatur bahwa tindakan yang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, atau tim kampanye secara sengaja, yang melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf a hingga j, dapat dihukum dengan pidana penjara hingga dua tahun dan denda maksimal 24 juta rupiah.

Dalam perspektif teori partisipasi politik, kampanye hitam dapat memanipulasi persepsi publik dengan menyebarkan informasi palsu atau berlebihan, yang dapat mengarahkan pemilih pada keputusan yang tidak rasional. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas partisipasi politik karena pemilih tidak berpartisipasi berdasarkan pemahaman yang akurat tentang program atau visi kandidat, melainkan atas dasar manipulasi emosi, seperti rasa takut atau kebencian. Sementara itu, dalam kerangka teori etika politik, kampanye hitam melanggar prinsip-prinsip dasar etika yang menekankan kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Tindakan ini tidak hanya merusak reputasi pihak yang menjadi korban kampanye hitam, tetapi juga menciptakan iklim politik yang tidak sehat, di mana strategi negatif lebih diutamakan daripada adu gagasan yang konstruktif. Akibatnya, integritas demokrasi melemah, karena proses politik tidak lagi berfungsi sebagai arena diskusi rasional, melainkan menjadi medan pertarungan yang diwarnai fitnah dan manipulasi. Untuk menjaga integritas demokrasi, diperlukan regulasi yang lebih tegas dan peningkatan literasi politik masyarakat agar kampanye hitam tidak mendapat tempat dalam sistem demokrasi yang ideal.

### C. Strategi Mengembalikan Integritas Demokrasi Di Tengah Maraknya Kampanye Hitam

Informasi negatif yang disebarkan dalam kampanye hitam berbeda dengan kampanye negatif. Pada kampanye hitam, informasi negatif sering kali disebarkan tanpa didukung oleh data yang valid, bahkan bisa berujung pada fitnah dan tuduhan palsu. Selain itu, strategi kampanye hitam sering kali melibatkan penyebaran isu-isu sensasional atau kontroversial dengan tujuan untuk menciptakan kegaduhan di kalangan pemilih dan mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih substansial. Isu-isu yang sering digunakan dalam kampanye hitam antara lain penghinaan terhadap profil, agama, suku, atau golongan lawan politik. Kampanye hitam selalu menjadi tantangan dalam setiap pemilu, dan di era digital saat ini, penyebaran kampanye hitam semakin masif dengan dampak yang sangat merugikan. Pihak yang paling dirugikan jelas adalah lawan politik pelaku kampanye hitam, terutama mereka yang memiliki rekam jejak bersih dan profesional.

---

<sup>16</sup> Rifki Fadilah. (2020). "Peran Media Sosial Dalam Kampanye Politik Di Indonesia" *Jurnal Komunikasi Dan Politik*, 5(1). Hal. 45.

<sup>17</sup> Zulfikri Sulaeman. (2014). *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*.

Strategi untuk mengembalikan integritas yang hilang yang disebabkan dengan maraknya kampanye hitam dalam partisipasi politik memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pertama, peningkatan literasi politik sangat penting agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menyaring informasi dan memilih kandidat berdasarkan kebijakan serta rekam jejak, bukan berdasarkan isu yang dibangun melalui kampanye hitam. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat sipil juga menjadi kunci dalam menciptakan budaya politik yang sehat.<sup>18</sup> Pemerintah harus mendorong penyelenggaraan diskusi publik, seminar atau forum yang membahas pentingnya menjaga integritas dalam berpolitik dan berpartisipasi dalam pemilu. Lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan pendidikan politik yang berbasis pada etika dan moralitas dalam kurikulum, sehingga generasi muda lebih siap untuk terlibat dalam politik secara bijak dan bertanggung jawab.

Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam sangat diperlukan. Pemerintah harus menindak tegas penyebar hoax dan fitnah yang merusak integritas pemilu, dengan dukungan lembaga-lembaga independen yang mengawasi jalannya kampanye. Salah satunya dengan peningkatan peran lembaga independent seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga-lembaga ini harus diberdayakan lebih lanjut dalam mengawasi jalannya kampanye dan menindak tegas pelanggaran yang terjadi, termasuk kampanye hitam yang menyebar melalui berbagai saluran komunikasi.<sup>19</sup> Dengan memberi kewenangan yang lebih besar pada lembaga-lembaga ini, mereka dapat mencegah kampanye hitam dan memastikan proses politik tetap transparan dan adil.

Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu harus dijaga agar publik merasa yakin bahwa hasil pemilu sah dan adil. Hal ini termasuk memastikan bahwa tidak ada manipulasi data atau intervensi yang merugikan salah satu pihak.<sup>20</sup> Penguatan etika politik juga sangat penting, dengan mendorong para politisi untuk mengutamakan diskursus yang sehat dan menghormati perbedaan pendapat. Selain itu, pendekatan melalui kampanye positif sangat penting untuk menciptakan suasana yang lebih sehat dalam politik. Para politisi dan partai politik sebaiknya lebih fokus pada penyampaian visi, misi dan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, daripada menyerang karakter lawan dengan cara yang tidak etis. Kampanye yang berbasis pada ide dan solusi konkret akan lebih efektif dalam mengedukasi pemilih dan mengurangi pengaruh negatif dari kampanye hitam.

Adapun peran media dan platform digital sangat signifikan. Media harus diatur untuk meminimalkan penyebaran informasi yang merusak dan membatasi kampanye hitam di platform digital. Pendekatan ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, partai politik, media dan masyarakat sipil untuk menciptakan iklim politik yang lebih jujur dan adil. Penguatan regulasi di media sosial juga harus dilakukan. Platform digital yang sering digunakan untuk menyebarkan kampanye hitam perlu bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk memperketat aturan penyebaran informasi yang dapat merusak integritas politik. Misalnya, mereka dapat mengimplementasikan sistem verifikasi konten dan menindak akun-akun yang terlibat dalam penyebaran hoax atau fitnah politik.

Mengembalikan integritas dalam partisipasi politik di tengah maraknya kampanye hitam memerlukan pendekatan strategis yang menggabungkan teori partisipasi politik dan teori etika politik. Seperti yang sudah peneliti jelaskan pada penjelasan diatas, strategi-strategi seperti peningkatan literasi politik, peningkatan peran lembaga independent, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu dan juga pentingnya peran media, sangat selaras dengan teori yang peneliti ambil yakni penggabungan antara teori partisipasi politik dan teori etika politik. Dari perspektif teori partisipasi politik, penting untuk meningkatkan literasi

---

<sup>18</sup> Arif A dan Fadhil M. (2020). "Strategi Peningkatan Integritas Pemilu Di Era Digital" *Jurnal Politik Indonesia*, 15(2). Hal. 106.

<sup>19</sup> Nasution A. S. (2021). "Peran Lembaga Pemilu Dalam Mengatasi Kampanye Hitam Di Indonesia" *Jurnal Politik Dan Hukum*, 28(1). Hal. 90.

<sup>20</sup> Siregar R. P dan Harahap M. (2019). "Pengaruh Kampanye Hitam Terhadap Persepsi Pemilih Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Politik*, 22(1). Hal. 62.

politik masyarakat agar pemilih lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima. Partisipasi yang cerdas dan terinformasi akan mengurangi efektivitas kampanye hitam, karena pemilih tidak mudah terpengaruh oleh narasi negatif yang tidak berdasar. Sementara itu, teori etika politik menekankan perlunya membangun budaya politik yang berorientasi pada kejujuran, tanggung jawab dan penghormatan terhadap lawan politik. Partai politik dan kandidat perlu menginternalisasi prinsip-prinsip etika ini dalam setiap strategi mereka, memastikan bahwa kampanye dilakukan dengan cara yang adil dan bermartabat. Regulasi yang tegas terhadap penyebaran kampanye hitam, termasuk penerapan sanksi hukum dan administratif, juga harus didukung oleh komitmen etis dari seluruh aktor politik.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Partisipasi politik merupakan kunci dalam sistem demokrasi, dengan melibatkan masyarakat dalam pemilu, demonstrasi, kegiatan partai politik dan kampanye. Namun, partisipasi ini dapat disalahgunakan dalam bentuk kampanye hitam, yang dapat melemahkan demokrasi. Kemajuan teknologi informasi dapat berperan dalam mempercepat penyebaran kampanye hitam dan informasi palsu. Dampak negatif dari kampanye hitam dapat memengaruhi perilaku politik masyarakat dan merusak pendidikan politik, merusak reputasi atau karakter lawan politik dan krisis integritas politik, sehingga akan menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan aktor politik. Pada akhirnya, ini mengancam kualitas demokrasi. Dalam mengembalikan integritas demokrasi akibat adanya kampanye hitam, terdapat beberapa strategi perlu diterapkan. Pertama, peningkatan literasi politik masyarakat. Kedua, memperketat pengawasan dan menegakkan hukum. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Keempat, media juga harus diatur untuk mengurangi penyebaran informasi. Strategi ini selaras dengan kedua teori yang diambil, dari perspektif teori partisipasi politik, penting untuk meningkatkan literasi politik masyarakat agar pemilih lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima dan dari perspektif teori etika politik menekankan perlunya membangun budaya politik yang berorientasi pada kejujuran, tanggung jawab dan penghormatan terhadap lawan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Dara dan Ridwan Arifin. (2019). *“Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia” DIKTUM: Jurnal Syari’ah Dan Hukum, 17(1)*.
- Arif A dan Fadhil M. (2020). *“Strategi Peningkatan Integritas Pemilu Di Era Digital” Jurnal Politik Indonesia, 15(2)*.
- Aziz Y. M dan Hidayat S. (2020). *Dinamika Sistem Politik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Deliar Noer. (1987). *Pemikiran Dan Perubahan Politik Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Miriam Budiarto. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mochtar Mas’oed. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhammad Rizaldi. (2014). *“Pro Dan Kontra Dalam Black Campaign Di Indonesia” Jurnal Fiat Justitia, 2(2)*.
- Nasution A. S. (2021). *“Peran Lembaga Pemilu Dalam Mengatasi Kampanye Hitam Di Indonesia” Jurnal Politik Dan Hukum, 28(1)*.



- Nurul Akhmad. (2010). *Mengenal Dan Mengawal Demokrasi: Kajian Teoritik Dan Kumpulan Artikel Pemilu*. Semarang: CV Aneka Ilmu.
- Ramlan Surbakti. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Rifki Fadilah. (2020). "Peran Media Sosial Dalam Kampanye Politik Di Indonesia" *Jurnal Komunikasi Dan Politik*, 5(1).
- Shirky. (2008). *Here Comes Everybody: The Power Of Organizing Without Organizations*. Penguin Press: New York.
- Siregar R. P dan Harahap M. (2019). "Pengaruh Kampanye Hitam Terhadap Persepsi Pemilih Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Politik*, 22(1).
- Suryadi. (2018). "Politisasi Identitas Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi Di Indonesia" *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 10(2).
- Zulfikri Sulaeman. (2014). *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung H*